

Pengembangan Model Aksi Antisipatif Berbasis Kolaborasi Multi-Pihak dalam Kesiapsiagaan Banjir Kabupaten Pandeglang

Roy Tumpal Pakpahan

Universitas Moestopo Beragama (Beragama), Jakarta, Indonesia
E-Mail Korespondensi: roy.tumpal@gmail.com

Abstract - *This study aims to analyze and develop an anticipatory action model based on multi-stakeholder collaboration for flood preparedness in Pandeglang Regency, where flood management practices have predominantly relied on reactive emergency response measures. The primary issue identified is the limited institutionalization of anticipatory actions during the pre-disaster phase, weak cross-sector coordination, insufficient resource integration, and minimal engagement of community groups and non-governmental stakeholders in preparedness planning. The research employs a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, field observations, and analysis of regional policy and contingency planning documents. Data were analyzed using an interactive process consisting of data collection, reduction, display, and conclusion drawing to identify patterns of collaboration, governance gaps, and structural constraints. The findings reveal that although formal contingency planning documents exist, anticipatory measures have not been systematically implemented or embedded within routine governance practices. This study proposes a conceptual model that emphasizes institutionalized collaboration, clearly defined stakeholder roles, strengthened early warning systems, integrated pre-disaster planning mechanisms, sustainable resource allocation, and active community participation. The proposed model contributes to the development of proactive, inclusive, and sustainable flood governance while enhancing local resilience and reducing long-term disaster risk in flood-prone regions.*

Keywords: *Anticipatory Action; Multi-Stakeholder Collaboration; Flood Preparedness*

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengembangkan model aksi antisipatif berbasis kolaborasi multi-pihak dalam kesiapsiagaan banjir di Kabupaten Pandeglang yang selama ini masih didominasi pendekatan responsif pada fase tanggap darurat. Permasalahan utama terletak pada belum terlembaganya aksi antisipatif pada fase pra-darurat, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam sistem kesiapsiagaan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan daerah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola kolaborasi dan hambatan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki dokumen rencana kontinjensi, implementasi aksi antisipatif belum berjalan sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menekankan pelembagaan kolaborasi, kejelasan peran antaraktor, penguatan sistem peringatan dini, integrasi perencanaan pra-darurat, serta penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola kesiapsiagaan banjir yang proaktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Aksi Antisipatif; Kolaborasi Multi-Pihak; Kesiapsiagaan Banjir

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam, khususnya banjir, sebagai konsekuensi dari kondisi geografis, hidrologis, dan iklim yang kompleks. Tingginya intensitas curah hujan, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, serta lemahnya sistem

pengelolaan lingkungan menjadikan banjir sebagai bencana yang paling sering terjadi dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta keberlangsungan pelayanan publik. (Zainuddin & Hidayat, 2020).

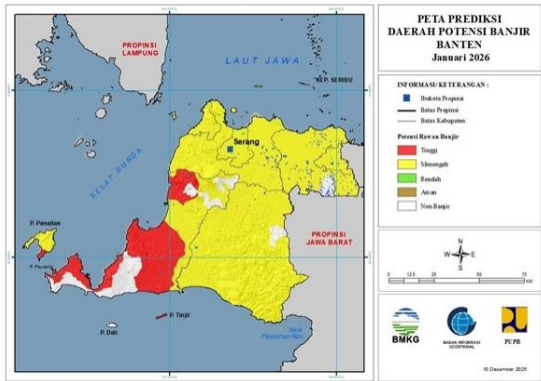


Gambar 1. Peta Prediksi Daerah Potensi Banjir Di Indonesia
Sumber Data : BMKG, 2025

Dalam perspektif administrasi publik, banjir tidak semata dipahami sebagai fenomena alam, melainkan sebagai persoalan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, efektivitas kebijakan publik, serta kemampuan negara dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.(Yulianti & Pratama, 2022).

Selama ini, paradigma penanggulangan bencana di Indonesia masih cenderung bersifat responsif dan berorientasi pada penanganan pascabencana. Pendekatan tersebut kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan penanganan, kurang efisiennya pemanfaatan sumber daya, serta tingginya kerugian sosial dan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya konsep pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*), muncul tuntutan untuk menggeser fokus kebijakan penanggulangan bencana ke arah pendekatan preventif dan antisipatif, terutama pada fase pra-darurat dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan banjir menjadi elemen kunci karena menuntut perencanaan yang sistematis, sistem peringatan dini yang efektif, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.(Sulaiman & Rahmawati, 2021).

Dalam konteks administrasi publik modern, pengelolaan kesiapsiagaan bencana tidak lagi dapat mengandalkan peran pemerintah secara tunggal. Kompleksitas permasalahan banjir menuntut adanya kolaborasi multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, masyarakat, relawan, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (Taryana et al., 2022). Pendekatan kolaboratif diyakini mampu memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendorong sinergi sumber daya dan pengetahuan. Namun demikian, dalam praktiknya, kolaborasi tersebut sering kali belum terlembaga secara sistematis dan belum diwujudkan dalam model aksi yang jelas, terintegrasi, dan berkelanjutan (Kusumasari, 2014).



Gambar 2. Peta Wilayah Daerah Potensi Banjir Kabupaten Pandeglang
Sumber Data : BPBD Provinsi Banten, 2025.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Kondisi geografis berupa wilayah dataran rendah, keberadaan daerah aliran sungai besar seperti Sungai Ciliman dan Cilemer, serta curah hujan yang tinggi pada musim hujan menjadikan banjir sebagai bencana yang terjadi secara berulang hampir setiap tahun. Dampak banjir di Kabupaten Pandeglang tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat, kesehatan, serta keberlangsungan pelayanan publik.

No	Kecamatan	Luas wilayah	Luas Wilayah Terdampak	Desa	Keterangan
1	Angsana	8.953 Ha	1.096 Ha	Cikayes, Kramatmuk, Angsana, Karangasri, Padaherang	Sungai Cisurukut, Ciliman
2	Cikemak	19.340 Ha	4.768 Ha	Cikadongdong, Curugcitra, Cikemak, Nanggala, Sukasenang, Rancasenang, Umbulan, Sukamulya, Parunglaksari, Samarhati, Sukawati, Tanjangan, Cikaduwatan	Cibitungan, Cibitung
3	Manjul	7.970 Ha	327 Ha	Kotakulak, Pasanggrahan, Cibitung, margi	Ciliman, Ciluluk, Cisarusan, Cilupa
4	Pagelaran	4.220 Ha	3.202 Ha	Siradungaya, Margasana, Senayanari, Mekar, Bama, Kertasana, Margagiri, Tegayapak, Pagelaran, Hamparikarya, Sukarta, Balagor, Sukadane	Sungai Cilemer, Cibantur Ciliman, Cijaga, Ciasa, Cibeasana, Cikobat
5	Panimbang	10.050 Ha	5.397 Ha	Tanjangan, Cikurup, Mekarwati, Panimbangaya, Mekarjaya, Gombong	Ciliman, Cipaeli, Cisurukut, Ciwana, Cisidengen leutik, Cikawung, Cipitukruk
6	Patia	4.866 Ha	3.178 Ha	Rahayu, Suranen, Cawi, Idaman, Cimayan, Patia, Babakan leutik, Pasangdang	Cilemer, Cisarutan, Cimayan, Cisarutan, Cikemak, Cikemak, Cikemak, Cikemak, Cikemak
7	Saketi	5.706 Ha	765 Ha	Miyau, Langensari, Sukalana	Cikadusan, Cibeasung, Cilemer
8	Sukaresmi	4.861 Ha	4.172 Ha	Cikaya, Cisarung, Sukamukti, Sukarung, Sukaresmi, Pasirkadu, Pandata, Karyasari, Senesipian	Sungai Ciliman Sungai Cilemer
9	Sobang	13.670 Ha	2.640 Ha	Tetuklala, Bojeng, Bojengwetan, Pangkalan, Cimani, Kutanekar, Kertanaharja, Sobang	Ciliman, Cipaeli, Cisurukut, Ciwana, Cisidengen leutik, Cikawung, Cipitukruk

Tabel 1. Wilayah Terdampak Banjir Kabupaten Pandeglang
Sumber Data: BPBD Kab. Pandeglang, 2025

Berdasarkan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Pandeglang Tahun 2025, banjir diproyeksikan berpotensi melanda puluhan desa yang tersebar di lebih dari sepuluh kecamatan dengan jumlah penduduk terdampak mencapai ratusan ribu jiwa. Fakta ini menunjukkan bahwa banjir di

Kabupaten Pandeglang telah menjadi persoalan struktural yang memerlukan pendekatan penanggulangan yang lebih sistematis, terencana, dan berorientasi jangka panjang. Meskipun pemerintah daerah telah menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah penduduk terdampak (Jiwa)	Jumlah KK	Jumlah KK terdampak
Angsana	30,159	18,982	7,54	4,746
Cikeusik	57,98	45,234	14,495	11,309
Munjul	27,171	1,052	6,793	264
Pagelaran	41,343	36,746	10,336	9,187
Panimbang	57,722	45,026	14,431	11,257
Patia	31,614	29,816	7,904	7,454
Saketi	50,649	7,586	12,662	1,896
Sukaresmi	39,971	38,56	9,993	9,639
Sobang	40,147	28,617	10,037	7,154
Sindangresmi	25,501	2,615	6,375	654
Picung	41,672	5,622	10,418	1,406
JUMLAH	443,929	259,857	110,982	64,965

Tabel 2. Jumlah Penduduk Yang Terdampak Banjir Setiap Tahun.
Sumber Data : BPBD Kab. Pandeglang, 2025.

Selama ini, penanggulangan banjir di tingkat daerah masih didominasi oleh pendekatan responsif melalui kegiatan tanggap darurat, seperti evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan pascabencana. Pendekatan tersebut memang penting, namun belum mampu secara optimal menekan risiko dan dampak banjir, terutama ketika kapasitas daerah, koordinasi antaraktor, serta partisipasi masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju manajemen risiko bencana yang bersifat proaktif melalui penguatan aksi antisipatif pada fase pra-darurat.



Gambar 3. Dokumentasi Banjir Tahunan Di Kabupaten Pandeglang
Sumber Data: Di Olah Peneliti,2025

Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kabupaten Pandeglang telah memperkenalkan konsep aksi antisipatif yang menekankan pentingnya peringatan dini, aksi dini, dan mekanisme pendanaan sebelum bencana

memasuki fase tanggap darurat. Namun, pelaksanaan aksi antisipatif tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, antara lain lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan pelibatan masyarakat dan relawan, serta belum terbangunnya pola kolaborasi multi-pihak yang terstruktur dan terintegrasi dalam sistem kesiapsiagaan banjir. Penanggulangan bencana banjir pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai aktor. Tanpa adanya kolaborasi multi-pihak yang terencana dan terinstitusionalisasi, upaya kesiapsiagaan dan aksi antisipatif berpotensi berjalan secara parsial dan kurang efektif (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, pengembangan model aksi antisipatif berbasis kolaborasi multi-pihak menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat tata kelola kesiapsiagaan banjir di Kabupaten Pandeglang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia akibat interaksi kompleks antara faktor geografis, hidrologis, geomorfologis, serta dinamika perubahan iklim global (Aldrian & Djamil, 2019; Ward et al., 2020). Intensitas curah hujan ekstrem yang semakin meningkat sebagai konsekuensi perubahan iklim telah memperbesar risiko kejadian banjir di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir dan dataran rendah (Hirabayashi et al., 2018). Dalam konteks ini, banjir tidak lagi dapat dipahami semata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai hasil interaksi antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas tata kelola (governance capacity) (UNDRR, 2019).

Dalam perspektif administrasi publik modern, bencana banjir mencerminkan kualitas tata kelola risiko yang dimiliki suatu daerah (Tierney, 2019). Konsep disaster risk governance menekankan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan pengurangan risiko bencana (DRR) (Ahrens & Rudolph, 2020). Sejumlah studi menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola lokal, fragmentasi kebijakan, serta rendahnya integrasi antaraktor sering kali menjadi penyebab utama tingginya dampak banjir di negara berkembang (Djalante et al., 2017; Meijerink & Dicke, 2018).

Perkembangan paradigma pengurangan risiko bencana secara global mengalami pergeseran signifikan sejak diadopsinya *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*, yang menekankan pendekatan preventif, kesiapsiagaan, dan penguatan ketahanan (resilience) dibandingkan sekadar respons pascabencana (UNDRR, 2019). Dalam kerangka ini, kesiapsiagaan banjir menjadi fase krusial yang menentukan efektivitas respons dan minimalisasi kerugian (Coppola, 2015). Kesiapsiagaan mencakup penguatan sistem peringatan dini, perencanaan kontinjensi, simulasi evakuasi, serta koordinasi lintas aktor sebelum bencana terjadi (Wamsler, 2016).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik penanggulangan bencana di banyak daerah masih didominasi oleh pendekatan reaktif dan tanggap darurat (Sulaiman & Rahmawati, 2021). Pendekatan ini sering kali menimbulkan pemborosan anggaran, keterlambatan distribusi bantuan, serta rendahnya efektivitas perlindungan masyarakat rentan (Yulianti &

Pratama, 2022). Oleh karena itu, berkembang konsep *anticipatory action*, yaitu tindakan berbasis prediksi risiko dan sistem peringatan dini yang memungkinkan intervensi dilakukan sebelum dampak bencana terjadi (Wilkinson et al., 2018).

Anticipatory action menekankan pentingnya integrasi antara data meteorologis, sistem informasi kebencanaan, skema pendanaan pra-bencana, serta mekanisme koordinasi lintas sektor (Coughlan de Perez et al., 2016). Studi empiris menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengurangi kerugian ekonomi dan sosial secara signifikan dibandingkan pendekatan responsif tradisional (Weingärtner et al., 2020). Dalam konteks pemerintahan daerah, aksi antisipatif membutuhkan kesiapan regulasi, fleksibilitas anggaran, serta struktur koordinasi yang jelas (Béné et al., 2018).

Dalam literatur administrasi publik, kompleksitas permasalahan banjir tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan hierarkis yang bersifat top-down semata (Emerson & Nabatchi, 2015). Model *collaborative governance* menegaskan pentingnya pelibatan multi-pihak dalam pengambilan keputusan publik untuk menghasilkan solusi yang lebih adaptif dan inklusif (Ansell & Gash, 2008). Kolaborasi memungkinkan integrasi sumber daya, pengetahuan lokal, kapasitas teknis, serta legitimasi sosial dalam satu kerangka aksi bersama (Bryson et al., 2015).

Dalam konteks manajemen bencana, kolaborasi multi-pihak terbukti meningkatkan efektivitas koordinasi dan mempercepat respons darurat (Kapucu & Garayev, 2016). Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan berbasis kolaborasi mampu memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kapasitas komunitas dalam menghadapi risiko (Aldrich & Meyer, 2015). Namun demikian, tantangan utama dalam praktik kolaborasi adalah lemahnya institusionalisasi, konflik kepentingan antaraktor, serta kurangnya kepemimpinan kolaboratif (Emerson et al., 2012).

Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan banjir tinggi menghadapi tantangan tata kelola yang kompleks. Data BPBD menunjukkan bahwa lebih dari 259.000 jiwa terdampak banjir setiap tahunnya di berbagai kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko banjir telah bersifat struktural dan memerlukan pendekatan sistemik yang tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga pada penguatan kesiapsiagaan berbasis kolaborasi.

Meskipun Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten Pandeglang telah mengadopsi konsep aksi antisipatif, implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya integrasi lintas sektor dan minimnya model operasional yang jelas. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan *anticipatory action* sangat bergantung pada desain model tata kelola yang terstruktur dan adaptif terhadap karakteristik lokal (Wilkinson et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model konseptual yang mampu menjembatani teori *collaborative governance* dengan praktik kesiapsiagaan banjir di tingkat daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan mengembangkan model aksi antisipatif penanggulangan banjir berbasis kolaborasi multi-pihak yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya

khazanah keilmuan administrasi publik, khususnya dalam kajian tata kelola kolaboratif dan manajemen bencana, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa model konseptual dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan banjir secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki tiga dimensi keterbaruan.

Pertama, secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *anticipatory action* dengan teori *collaborative governance* dalam konteks manajemen risiko banjir di tingkat kabupaten, yang masih relatif terbatas dalam literatur administrasi publik Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya memisahkan antara kajian kesiapsiagaan dan kolaborasi, tanpa merumuskan model integratif yang operasional.

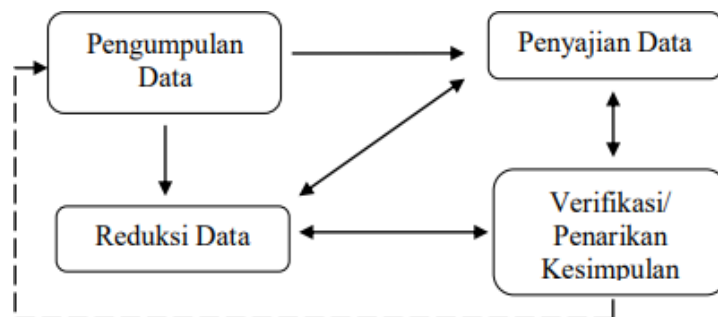
Kedua, secara empiris, penelitian ini berfokus pada Kabupaten Pandeglang sebagai studi kasus wilayah dengan karakteristik geografis dan kerentanan tinggi, yang belum banyak dikaji dalam literatur internasional.

Ketiga, secara praktis, penelitian ini menghasilkan model konseptual aksi antisipatif berbasis kolaborasi multi-pihak yang dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik risiko serupa.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Sebagai aspek pelaksanaan Pengembangan Model Aksi Antisipatif Berbasis Kolaborasi Multi-Pihak di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini berfokus pada Pengembangan Model Aksi Antisipatif Berbasis Kolaborasi Multi-Pihak dalam Kesiapsiagaan Banjir di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci (key instrument) penelitian dalam penelitian kualitatif ini. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti HP Recorder, Kamera HP, dan Buku Catatan Lapangan untuk mengumpulkan data. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data tersebut. Analisis ini melibatkan pengkodean data, identifikasi tema, dan pemetaan dan penafsiran pola yang muncul Proses ini memungkinkan peneliti untuk membangun narasi yang kohesif tentang bagaimana Pengembangan Model Aksi Antisipatif Berbasis Kolaborasi Multi-Pihak dalam Kesiapsiagaan Banjir di Kabupaten Pandeglang

Penelitian ini untuk menganalisis data yang telah terkumpul yaitu peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiono, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data berdasarkan model Miles and Huberman dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Analisis Data Model Miles and Huberman

Sumber Data : (Sugiono, 2019)

Dari Gambar diatas dapat dijelaskan langkah-langkah analisis data pada penelitian ini, dilakukan dengan analisis data Model Miles dan Huberman melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan tahapan awal dari analisis data, dimana data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang peneliti kumpulkan selama kegiatan berlangsung berupa catatan, rekaman, foto - foto, serta dokumen -dokumen lainnya. Selanjutnya, data-data yang berupa data variabel dari hasil wawancara diubah menjadi bentuk tulisan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut (Sugiono, 2019) data yang diperoleh dari lapangannya jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang penting atau difokuskan, dan mencari tema dan polanya. Oleh sebab itu reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya.

Reduksi data pada penelitian ini merupakan data hasil observasi dan wawancara yang dituangkan kedalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci, kemudian direduksi, dirangkum, serta difokuskan yang terpenting untuk dipilih yang kemudian dicari tema atau polanya, sehingga uraian laporan tersebut menjadi lebih jelas dan mempermudah penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting yang selanjutnya dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Begitu pun dengan penyajian data pada penelitian ini, dituangkan dalam bentuk teks naratif.

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Langkah keempat yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut (Sugiono, 2019) kesimpulan dalam sebuah penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusah masalah yang dirumuskan pada awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam sebuah penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan

berkembang setelah penelitian berada di lapangan objek penelitian (Miles et al., 2014)

Penarikan kesimpulan penelitian dalam hal ini dilakukan peneliti dari awal penelitian. Peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya keseluruhan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan. Pada langkah penelitian ini diharapkan peneliti mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria di dalam penelitian serta data yang diperoleh pun dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Model Aksi Antisipatif Berbasis Kolaborasi Multi-Pihak dalam Kesiapsiagaan Banjir di Kabupaten Pandeglang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi antisipatif penanggulangan banjir di Kabupaten Pandeglang secara normatif telah memiliki landasan kebijakan dan perencanaan yang cukup memadai, terutama melalui keberadaan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2025. Dokumen tersebut telah memuat identifikasi wilayah rawan, skenario dampak, serta kebutuhan sumber daya pada fase pra-darurat, yang menandakan adanya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya pendekatan kesiapsiagaan. Namun demikian, pada tataran implementasi, aksi antisipatif belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Penanggulangan banjir masih didominasi oleh pendekatan responsif yang berfokus pada fase tanggap darurat, seperti evakuasi dan distribusi bantuan pascabencana. (Putra, 2019) Kegiatan pra-darurat, seperti simulasi kesiapsiagaan, penguatan sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor sebelum bencana terjadi, belum menjadi praktik rutin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan praktik implementasi di lapangan, yang dalam perspektif administrasi publik mencerminkan masih kuatnya paradigma reaktif dalam tata kelola kebencanaan di tingkat daerah. (BPBD Pandeglang, 2024)

Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkap bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam aksi antisipatif penanggulangan banjir di Kabupaten Pandeglang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka kolaborasi yang terstruktur. (Rakyat, 2021) Pemerintah daerah, khususnya BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait, masih menjadi aktor dominan, sementara peran masyarakat, relawan, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan akademisi cenderung bersifat situasional dan lebih aktif pada fase tanggap darurat. Padahal, penanggulangan banjir merupakan persoalan kompleks yang menuntut kolaborasi multi-pihak agar sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas yang dimiliki berbagai aktor dapat dimanfaatkan secara optimal. Lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya mekanisme komunikasi bersama, serta keterbatasan anggaran pra-darurat menjadi kendala utama dalam penerapan aksi antisipatif berbasis kolaborasi. (Putra, 2019) Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan model aksi antisipatif yang terinstitusionalisasi dan berbasis kolaborasi multi-pihak, dengan menekankan

penguatan kelembagaan, kejelasan peran aktor, mekanisme koordinasi berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat dalam sistem kesiapsiagaan banjir. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola penanggulangan banjir yang lebih proaktif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang.

Pengembangan model aksi antisipatif berbasis kolaborasi multi-pihak dalam kesiapsiagaan banjir melibatkan integrasi teori governance kolaboratif, capacity building, dan pendekatan forecast-informed action untuk memitigasi risiko sebelum bencana terjadi. Model ini menekankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga internasional guna membangun sistem peringatan dini, perencanaan darurat, dan mobilisasi sumber daya secara proaktif.

Menurut (Hasna, 2023) mengusulkan tata kelola kolaboratif multisektoral sebagai fondasi utama, di mana stakeholder saling melengkapi kelebihan dan kekurangan untuk mitigasi banjir rob berkelanjutan, dengan visi bersama melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah dan komunitas. (Ulum, 2013) menambahkan perspektif governance network dan capacity building, menekankan penguatan rasa krisis kolektif, komitmen, serta tanggung jawab bersama antar-pihak untuk manajemen banjir sistematis di daerah rawan seperti Jawa Timur. memperkenalkan tiga building blocks antisipatif risk information, forecasting early warning, planning operations, serta pre-arranged finance untuk koordinasi regional di Asia Tenggara, mengurangi fragmentasi melalui konsensus terminologi dan investasi jangka panjang pada adaptasi iklim (Hub, 2022).

(Ranggi, 2016) menyoroiti collaborative governance lintas instansi sebagai strategi non-teknis, bergantung pada peran jelas masing-masing pihak untuk mengurangi risiko banjir di Sungai Ciliwung, dengan kepercayaan sebagai fondasi berbagi informasi dan sumber daya. Penelitian di oleh tim MSEJ mengidentifikasi kualitas kolaborasi ditentukan oleh distribusi otoritas, mekanisme koordinasi, alur informasi, integrasi pengetahuan lokal, dan adaptasi institusional, yang membentuk kerangka teoritis untuk resiliensi komunitas urban. (MSEJ, 2024) membahas tantangan kolaborasi multi-agen seperti hambatan komunikasi dan koordinasi, merekomendasikan model adaptif untuk meningkatkan efektivitas respons banjir melalui integrasi aktor pemerintah dan non-pemerintah (Abdeen, 2021).

(Nurmandi & Yunus, 2024) mengembangkan konsep community-based disaster management (CBDM) dengan variabel kolaborasi seperti partisipasi masyarakat, komunikasi antar-stakeholder, dan keberlanjutan program, di mana faktor pendukung mencakup anggaran dan pelatihan untuk mengoptimalkan penanganan banjir. Menurut (Bongo, 2025) mengeksplorasi institusionalisasi aksi antisipatif di tingkat governance, menunjukkan proses dan mekanisme untuk menghubungkan AA dengan pembangunan damai di konteks kompleks. menganalisis peran multi-stakeholder dalam pengurangan risiko longsor-banjir di Aceh Tengah, menekankan analisis peta risiko dan kolaborasi untuk pencegahan spasial (Lazuar, 2020)

Pendapat tambahan dari (Ginting, 2014) mendukung J-FEWS sebagai model peringatan dini berbasis kolaborasi dengan BBWS dan BPBD untuk prakiraan akurat banjir Jakarta. (Prihatin, 2013) mengaitkan kolaborasi dengan

pencegahan faktor antropogenik seperti tata guna lahan, melalui sinergi kebijakan dan edukasi masyarakat. (Maryani, 2010) mempromosikan preparedness melalui organisasi tepat sasaran dan pelatihan multi-pihak untuk antisipasi banjir. (Eldi, 2021) faktor pemicu banjir di Jakarta yang memerlukan kolaborasi dinamis untuk drainase dan normalisasi sungai. (Kent, 1994) menekankan peramalan dan keputusan pencegahan berbasis jejaring untuk minimalkan korban.

Implikasi Kebijakan Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan aksi antisipatif penanggulangan banjir di Kabupaten Pandeglang memerlukan penguatan kebijakan yang secara eksplisit mengarahkan pergeseran paradigma dari pendekatan responsif menuju pendekatan preventif dan antisipatif. Pemerintah daerah perlu menjadikan aksi antisipatif sebagai bagian integral dari kebijakan kebencanaan daerah, tidak hanya sebagai dokumen perencanaan normatif, tetapi sebagai pedoman operasional yang diterapkan secara konsisten pada fase pra-darurat.

Pertama, diperlukan kebijakan pelembagaan kolaborasi multi-pihak melalui pembentukan forum atau mekanisme koordinasi permanen kesiapsiagaan banjir yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah terkait, masyarakat, relawan, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Forum ini berfungsi sebagai wadah perumusan tujuan bersama, pembagian peran yang jelas, serta penyelarasan program dan sumber daya antaraktor sebelum bencana terjadi.

Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas dengan memastikan informasi risiko banjir dapat diakses, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh masyarakat. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui integrasi teknologi peringatan dini dengan edukasi kebencanaan, pelatihan rutin, serta simulasi kesiapsiagaan yang melibatkan masyarakat secara aktif di wilayah rawan banjir.

Ketiga, implikasi kebijakan lainnya adalah perlunya pengalokasian anggaran pra-darurat yang lebih proporsional dan fleksibel untuk mendukung kegiatan aksi antisipatif, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kolaboratif, serta pendanaan awal untuk tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi. Kebijakan penganggaran ini menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan aksi antisipatif dan mengurangi ketergantungan pada anggaran tanggap darurat.

Keempat, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi teknis yang mengatur standar operasional aksi antisipatif berbasis kolaborasi multi-pihak, termasuk mekanisme komunikasi, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja kesiapsiagaan banjir. Regulasi ini penting untuk mencegah fragmentasi kebijakan dan memastikan bahwa seluruh aktor memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam pengurangan risiko banjir.

Dengan demikian, implikasi kebijakan praktis dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kesiapsiagaan banjir tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan dan perencanaan, tetapi oleh kemampuan

pemerintah daerah dalam membangun tata kelola kolaboratif yang terinstitusionalisasi, adaptif, dan berorientasi pada pencegahan risiko secara berkelanjutan. Jika diimplementasikan secara konsisten, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir sekaligus memperkuat resiliensi Kabupaten Pandeglang terhadap bencana di masa mendatang.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji serta merumuskan temuan konseptual dan implikatif berdasarkan kerangka teoritik dan data empiris yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena yang diteliti tidak dapat dipahami secara parsial atau administratif semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari dinamika tata kelola publik yang kompleks, melibatkan interaksi antaraktor, struktur kelembagaan, kapasitas kebijakan, serta konteks sosial yang melingkupinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan/program yang dianalisis sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan, kejelasan peran institusional, konsistensi implementasi regulasi, serta dukungan sumber daya yang memadai. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi menjadi faktor krusial yang memengaruhi capaian tujuan kebijakan. Dalam perspektif teoritik, hasil penelitian memperkaya kajian administrasi publik dengan menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola kolaboratif dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pada konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menegaskan bahwa penguatan tata kelola yang terintegrasi, adaptif, dan partisipatif menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan yang diteliti.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan desain kebijakan yang lebih kontekstual, peningkatan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan, serta institusionalisasi mekanisme koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan. Pemerintah daerah dan aktor terkait perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada capaian substansial dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Secara akademik, novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis empiris berbasis konteks lokal dengan kerangka teoritik tata kelola publik kontemporer, sehingga menghasilkan model konseptual yang lebih aplikatif dan relevan bagi pengembangan studi administrasi publik. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman mengenai relasi antara desain kebijakan dan implementasi, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, sekaligus mendorong transformasi tata kelola publik yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdeen, F. N. (2021). Challenges in multi-agency collaboration in disaster management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bongo, P. P. (2025). Institutionalisation of anticipatory action within government systems. *ScienceDirect*.
- Eldi. (2021). Analisis Penyebab Banjir di DKI Jakarta. *Journal of Environmental Education and Sustainable Development*, 22, 50–60.
- Ginting, S. (2014). Sistem Peringatan Dini Banjir Jakarta. *Jurnal Sumber Daya Air*, 10(1), 71–84.
- Hasna, A. L. (2023). Collaborative Governance dalam Mitigasi Banjir Rob. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Hub, A. (2022). *A new framework to improve collaboration on anticipatory action in South-East Asia*.
- Kent, R. (1994). Disaster preparedness and response. *JANE*, 13(2).
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal*. Gava Media.
- Lazuar, S. T. (2020). *Analisis Peran Multi Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Banjir*.
- Maryani, E. (2010). *Model Pembelajaran Mitigasi Bencana*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3 (ed.)). Sage Publications.
- MSEJ. (2024). The Role of Multi-Stakeholder Collaboration in Flood Disaster Management. *Management Science and Entrepreneurship Journal*.
- Nurmandi, & Yunus. (2024). *Community-Based Disaster Management*.
- Pandeglang, B. P. B. D. K. (2024). *Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Pandeglang*. BPBD Kabupaten Pandeglang.
- Prihatin. (2013). *Disaster risk and flood management*.
- Putra, F. (2019). Kolaborasi aktor dalam kebijakan publik: Perspektif governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 45–60.
- Rakyat, K. P. U. dan P. (2021). *Strategi pengendalian banjir dan pengelolaan daerah aliran sungai*. Kementerian PUPR.
- Ranggi. (2016). *Collaborative Governance*.
- Rini, R. O. P., Ilham, W., Putera, D. A., & Dermawan, A. A. (2022). Perencanaan Rekonstruksi Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.37253/altasia.v4i2.6789>
- Sulaiman, A., & Rahmawati, D. (2021). Kesiapsiagaan bencana banjir berbasis masyarakat dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 25(1), 65–80.
- Taryana, A., Rifa, M., Mahmudi, E., & Bkti, H. (2022). *ANALISIS KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI JAKARTA*. 13(2), 302–311.
- Ulum, M. C. (2013). Governance dan Capacity Building dalam Manajemen Banjir. *JDPB BNPB*.
- Yulianti, R., & Pratama, A. B. (2022). Collaborative governance dalam

pengurangan risiko bencana di tingkat lokal. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 89–104.

Zainuddin, A., & Hidayat, R. (2020). Evaluasi kebijakan penanggulangan banjir di daerah rawan bencana. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 121–137.